



## **Keseimbangan Peran Purusha dan Pradana: Kajian Teoritis Kesetaraan Gender di Bali**

### ***Balancing the Roles of Purusha and Pradana: A Theoretical Study of Gender Equality in Bali***

**Kadek Putri Lestari Wardani, Taufik Akbar Rizqi Yunanto\***  
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya, Indonesia

---

#### **Abstrak**

Perkembangan budaya Bali dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu, yang seharusnya menciptakan keselarasan antara tradisi dan ajaran keagamaan. Kenyataan budaya patriarki di Bali, terutama dalam hal sistem waris dan struktur kekerabatan, menunjukkan ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menggali perbedaan antara ajaran agama Hindu yang menekankan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dengan realitas budaya patriarki di Bali. Analisis difokuskan pada aspek hukum waris, peluang karir, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada peningkatan kesetaraan dalam pendidikan, ketidaksetaraan gender masih terasa dalam aspek-aspek lainnya. Perempuan Bali mengalami keterbatasan dalam mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks adat istiadat. Pada sektor karir, upah perempuan masih jauh dari setara dengan laki-laki. Kesenjangan ini menciptakan ketidakcocokan antara ajaran agama Hindu yang menegaskan kesetaraan gender dan realitas budaya Bali yang masih dipengaruhi oleh pola pikir patriarki. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan norma-norma budaya Bali untuk sejalan dengan ajaran agama Hindu yang menganjurkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

**Kata Kunci:** *purusha, pradana, kesetaraan gender*

#### **Abstract**

*The development of Bali's culture is grounded in the values of Hinduism, which ideally should create harmony between tradition and religious teachings. The reality of patriarchal culture in Bali, particularly in terms of inheritance systems and kinship structures, indicates gender inequality that still persists. This research employs a literature review method to explore the disparities between Hindu teachings emphasizing gender equality and the patriarchal cultural reality in Bali. The analysis focuses on aspects of inheritance laws, career opportunities, participation in decision-making, and access to education. The research findings indicate that, despite improvements in educational equality, gender disparities are still evident in other aspects. Balinese women face limitations in participating in decision-making, particularly in customary contexts. In the career sector, women's wages still lag far behind those of men. This gap creates a mismatch between Hindu teachings that emphasize gender equality and the cultural reality in Bali that remains influenced by patriarchal attitudes. The study underscores the importance of changing Bali's cultural norms to align with Hindu teachings advocating for gender equality.*

**Keywords:** *purusha, pradana, gender equality*

---

---

**How to Cite:** Wardani, K. P. L., & Yunanto, T. A. R. (2024). Keseimbangan Peran Purusha dan Pradana: Kajian Teoritis Kesetaraan Gender di Bali. **Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)** 10 (1): 82 - 92.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [taufik\\_yunanto@staff.ubaya.ac.id](mailto:taufik_yunanto@staff.ubaya.ac.id)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN

Perkembangan budaya Bali menyesuaikan dengan nilai ajaran agama Hindu. Masruroh (2022) menjelaskan bahwa, tradisi dan agama adalah dua hal yang berbeda namun bersifat melengkapi. Tradisi yang dianut oleh masyarakat menyesuaikan dengan ajaran agama. Rahmawati (2021) menjelaskan tradisi Bali dengan ajaran agama Hindu sebagai entitas yang saling terkait, hingga sulit dibedakan. Sistem pembagian waris merupakan salah satu budaya Bali yang cenderung bersifat patriarki, dan dipengaruhi oleh ajaran warisan Hindu yang tercantum dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Budaya patriarki Bali maupun ajaran warisan Hindu memberikan prioritas kepada anak laki-laki dalam keluarga sebagai penerima warisan, (Rahmawati, 2021).

Budaya patriarki Bali berasal dari nilai *purusha* dan *predana*. *Purusha* mewakili jiwa abadi dan *prakirti* adalah fisik manusia yang berubah-ubah manusia. Masyarakat Bali mengenal *purusha* berkaitan dengan laki-laki sedangkan *predana* hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, (Widayani & Hartati, 2015). Konsep ini digunakan sebagai dasar untuk membedakan status dan peran antara

perempuan dan laki-laki, dan dalam beberapa situasi, peran keduanya tidak dapat saling menggantikan satu sama lain, (Widayani & Hartati dalam Wiasti, 2006). Nilai ajaran agama Hindu ini yang memengaruhi ideologi budaya Bali, sehingga berkembang menjadi norma-norma, dan peraturan yang dikenal sebagai hukum adat dan *awig-awig*. Sistem ini memiliki sifat patrilineal dan berfungsi sebagai sarana kontrol sosial Widayani & Hartati (dalam Wiasti, 2006).

Sistem kebudayaan Bali cenderung bersifat patrilineal, (Hasan & Maulana, 2014). Holleman & Koentjaraningrat menjelaskan sistem patrilineal memiliki ciri-ciri seperti: hubungan kekerabatan ditegaskan melalui garis keturunan ayah, dan anak-anak dianggap sebagai keturunan ayah; warisan keluarga atau harta milik orang tua dialirkan melalui jalur keturunan laki-laki; pasangan yang baru menikah akan tinggal di pusat kediaman keluarga suami (dikenal sebagai adat patrilokal); laki-laki memegang posisi yang dominan dalam struktur sosial, sehingga perempuan yang menikah dianggap memutuskan ikatan dengan keluarga asal mereka, tanpa hak untuk pindah ke keluarga suami dan tanpa hak atas harta dan harta benda milik keluarga, (Widayani & Hartati, 2015). Ciri-ciri

tersebut mencerminkan bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki menduduki posisi yang lebih dominan daripada perempuan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam masyarakat. Situasi ini menghasilkan ketidaksetaraan dalam hal hak dan tanggung jawab perempuan.

Pada ajaran agama Hindu, peran perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling melengkapi dan mendukung, (Rahmawati, 2021). Hal ini termuat dalam kitab Manawa Dharmasastra 6, bab IX seloka 96, bahwa :

*“Prajānartha striyah srstah  
Samtarnatham ca manawah  
Tamsat sadharanu dharmah  
Crutau patnya sahadita”*

Arti: “Untuk menjadi ibu, Wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama istrinya”

Seloka ini menjelaskan setiap kelahiran manusia, memiliki kewajiban dan perannya masing-masing. Laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban dan perannya harus saling melengkapi, bekerja sama serta harmonis.

Perbedaan perempuan dan laki-laki bersifat komplementatif, yaitu perbedaan yang saling melengkapi. Ketika laki-laki tanpa perempuan akan tidak lengkap, begitu pula sebaliknya jika perempuan tanpa kehadiran laki-laki tidak merasakan lengkap. Tidak terdapat perbedaan perlakuan sosial kehidupan antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, (Rahmawati, 2021). Nilai dari ajaran ini bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan secara harkat dan martabat serta perannya adalah sejajar. Pada kenyataannya peran laki-laki diutamakan dalam pengambilan keputusan dan perempuan cenderung mengikuti, (Hartati, 2014). Kegiatan musyawarah pada masyarakat Bali sampai saat ini masih didominasi oleh keputusan dari laki-laki. Perempuan hanya sebagai pendukung dalam kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Terdapat hal yang masih menghambat perkembangan perempuan Bali, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Pertama, masalah pendidikan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan peluang, terutama bagi keluarga miskin. Kedua, masalah pola asuh didalam keluarga yang cenderung lebih memihak pada anak laki-laki daripada anak perempuan, yang

terkait dengan peran laki-laki sebagai penerus kewajiban keluarga dan norma adat seperti *nganyah* di banjar. Ketiga, masih ada ketidaksetujuan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan di luar rumah. Keempat, terdapat tekanan untuk menjalani gaya hidup yang lebih materialistik yang lebih mengutamakan aspek materi, (Hartati, 2014). Kondisi ini menjelaskan terdapat ketidaksesuaian antara nilai ajaran agama Hindu dengan sistem budaya Bali dalam kesetaraan peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Gender berbeda dengan sex, meskipun kata-kata ini memiliki etimologi yang sama, yaitu mengacu pada jenis kelamin. Secara umum, istilah "sex" digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal aspek biologis, seperti komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, struktur fisik tubuh, fungsi reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Di sisi lain, istilah "*gender*" lebih fokus pada aspek-aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya yang berkaitan dengan identitas gender seseorang. Kesetaraan gender, atau yang sering disebut sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua individu harus

diperlakukan secara adil dan sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, (Larasati & Ayu, 2020).

Kesetaraan gender terjadi ketika laki-laki dan perempuan memiliki sumber daya dan peluang yang sama. Ketidaksetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki tidak sama dalam hal peluang, perlakuan sosial, atau persepsi berdasarkan jenis kelamin, (Iqbal et al., 2022). Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dapat dicirikan dengan ketiadaan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan mengendalikan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Berpartisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang ada dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang cara menggunakan sumber daya tersebut dan hasil yang diperoleh darinya, (Rahmawati, 2021).

Permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah peran laki-laki & perempuan dalam budaya Bali masih belum sesuai dengan ajaran agama Hindu. Terdapat kesenjangan antara peran perempuan dengan laki-laki didalam budaya Bali. Kesenjangan gender erat dengan eksistensi

perempuan, melibatkan diskriminasi dan ketidakadilan. Perempuan tidak diberikan hak waris yang setara dengan laki-laki, menciptakan ketidaksetaraan gender dalam hak kepemilikan harta. Selain itu, norma-norma keagamaan sering kali memberikan hak waris yang lebih besar kepada pria daripada perempuan. Banyak kendala yang dihadapi masyarakat Bali dalam mencapai kesetaraan gender yang ideal.

Di era modern saat ini beberapa aspek kesetaraan peran telah terlihat, namun masih terdapat hambatan dan kendala yang berakar dalam masyarakat Bali, salah satunya adalah hak waris, dan hak pendidikan pada pihak perempuan. Hal ini tentu saja menjadi hambatan dalam menuju kesetaraan peran yang ideal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum memposisikan perempuan dalam struktur masyarakat Bali dan apakah sistem budaya patriarki masih relevan dalam konstruk sosial saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*. *Literature review* adalah kajian ilmiah yang menggambarkan identifikasi, pengembangan, menganalisa terkait hasil

buku, artikel, atau jurnal yang telah disusun sebelumnya, Pengumpulan artikel untuk tinjauan literatur ini, peneliti merinci literatur dari berbagai sumber, seperti *database* elektronik seperti *ScienceDirect*, *Google Scholar*, dan *Google*. Pada tahap awal pencarian artikel menggunakan kata kunci “purusa, pradana”, “kesetaraan gender purusa dan pradana” sehingga menemukan 12 artikel yang relevan, kemudian disusun dengan sistematis dan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat empat aspek kesetaraan peran yang akan dibahas, yaitu hukum waris, kesempatan karir, partisipatif/kesempatan berbicara, dan kesempatan pendidikan. Berikut adalah hasil kesetaraan peran *purusha* dan *pradana* dari keempat aspek:

### **Kesetaraan peran karir**

Karir adalah keahlian yang dipraktikkan di masyarakat dan dijadikan sumber kehidupan. Secara umum, tujuan dari karier adalah untuk memperoleh sejumlah uang sebagai dukungan bagi diri sendiri atau keluarga. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di Indonesia telah menjadi fokus perhatian baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Inpres No. IX Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), (Nasution et al., 2022). Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 Kebijakan untuk petani perempuan terbatas pada Pengarusutamaan Gender sebagai Rp.100.000, sedangkan petani laki-laki strategi untuk mencapai keadilan dan menerima upah sebesar Rp.120.000, kesetaraan gender dalam semua aspek meskipun kedua belah pihak melakukan kehidupan dan pembangunan. pekerjaan yang sama (Yani & Indrayani, Perempuan maupun laki-laki memiliki 2021).

hak yang sama, dan konsep gender tidak Ketidaksetaraan upah pada aspek dapat dipisahkan dalam program dan peran karir ini tentu saja tidak sejalan kegiatan Pembangunan, (Nasution et al., dengan peraturan pemerintah terkait RPJPN. Kondisi ini terjadi karena tiga faktor 2022).

Kabid BPS Provinsi Bali utama yang menyebabkan kontribusi menyatakan pada tahun 2011 mulai pendapatan perempuan lebih rendah terjadi penurunan angka pengangguran dibandingkan dengan laki-laki. Pertama, pada perempuan. sektor pertanian, angka perempuan memiliki tanggung jawab utama pekerja perempuan dan laki-laki hampir untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seimbang. Total angkatan kerja sehingga mereka hanya dapat melakukan perempuan di Bali mencapai 1.135.000, tugas di domain publik setelah pekerjaan sementara angka untuk laki-laki adalah rumah tangga selesai. Kedua, suami dianggap sebagai kepala keluarga dan dalam satu rumah tangga, baik istri pencari nafkah utama, sementara istri maupun suami aktif bekerja. Meskipun diharapkan untuk tetap di rumah dan data statistik menunjukkan angka pekerja mengurus rumah tangga (Yani & Indrayani, perempuan dan laki-laki hampir 2021). Adat istiadat masih menjadi salah seimbang, namun ternyata masih satu faktor ketidakadilan terkait upah pada terdapat kesenjangan antara upah aspek karir di masyarakat Bali.

pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Peran pemerintah sangat diperlukan Masyarakat Desa Songan untuk menciptakan regulasi dalam memberikan penguatan emansipasi penerapan RPJPN setiap lapisan masyarakat petani perempuan di dunia kerja. Bali. Individu yang telah dewasa baik Perempuan diberikan ruang yang sama perempuan ataupun laki bertanggung jawab dengan laki-laki, namun terdapat atas kesejahteraan ekonominya masing-masing. Ketika situasi ini tidak dapat ketidaksetaraan dalam hal upah. Upah masing.

diwujudkan, kewajiban akan dialihkan kepada pemerintah untuk mengurusnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki saja, menurut (Margarit Eicher dalam Ayu, Ardiansyah, & Danarlie, 2022).

### **Kesetaraan peran berbicara**

Perempuan Bali umumnya menghadapi keterbatasan dalam ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam aspek yang terkait dengan adat istiadat, (Rhoads dalam Firdaus, 2021). Kendala ini terjadi karena posisi perempuan dalam ranah adat istiadat dianggap lemah, sehingga dalam musyawarah adat, partisipasi perempuan diabaikan, (Firdaus, 2021). Salah satu contoh yang terjadi di Desa Adat Ketewel. Paruman desa dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Paruman ini hanya dihadiri oleh seluruh prajuru desa, yang semuanya adalah laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk ikut serta dalam paruman desa, sehingga tidak dapat memberikan saran atau masukan dalam proses pengambilan keputusan adat, (Prayoga, 2023).

Paruman desa adat memiliki ketentuan yang cenderung sama di setiap daerah. Pengalaman peneliti sebagai individu etnis Bali, melihat secara langsung bahwa paruman desa ditempat tinggalnya dihadiri oleh laki-laki saja. Pada aspek kesetaraan berbicara, perempuan cenderung diabaikan, sedangkan saat ini pendapat perempuan juga perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan upacara agama. Keputusan perempuan sangat penting untuk dipertimbangkan, karena perempuan Bali juga memiliki pengetahuan terkait adat, seperti *banten* (sesajen) dan langkah-langkah dalam menghaturkan sesajen, Prayoga (2023).

Perempuan dalam kartun sering digambarkan sebagai emosional, peminta maaf, ragu-ragu, dan plin-plan, sementara laki-laki lebih sering mengungkapkan pernyataan yang tegas, sederhana, dan kuat. Pendapat tersebut mencerminkan bagaimana pandangan dan representasi stereotip terhadap perempuan dalam media kartun, dapat memengaruhi persepsi dan penilaian terhadap perempuan dalam kehidupan nyata. Stereotip ini dapat menciptakan persepsi bahwa pandangan dan kontribusi perempuan diabaikan atau tidak dianggap penting, (Kramarae dalam Widianti, 2009)

### **Kesempatan pendidikan**

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki sangat jelas terlihat di Bali sejak dini anak perempuan diharapkan untuk membantu dengan berbagai tugas rumah tangga. Anak perempuan Bali sejak kecil diarahkan untuk menjadi istri yang taat kepada suaminya. Sementara itu, anak laki-laki cenderung mendapatkan kebebasan lebih karena beberapa orang tua menganggap mereka sebagai aset yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga, (Septiari & Dhamayanti, 2023). Saat ini kesetaraan pendidikan mulai terlihat adanya keseimbangan antara kesempatan menempuh pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki.

Data BPS pendidikan tahun 2022 menyatakan perempuan Bali rata-rata menempuh pendidikan hingga SLTA sebanyak 74,55% dan laki-laki sebanyak 74,91%. Data ini menunjukkan adanya kesetaraan rata-rata pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Kondisi ini terjadi karena perempuan Bali ingin meningkatkan martabat dan kedudukannya sebagai perempuan, tanpa meninggalkan tugas dan peran tradisionalnya. Perempuan Bali mulai mengalihkan fokus ke dunia eksternal dan menginginkan emansipasi dalam

berbagai aspek (Suartini & Yuniarika Parwati, 2020).

Segelintir masyarakat Bali, sampai saat ini masih menyulitkan perempuan Bali dalam menggapai kesetaraan dalam hal pendidikan. Terdapat bentuk wacana yang kesempatan pendidikan perempuan Bali, yaitu "*Kanggoang masekolah amonto dogen, meme barengin medagang di peken*", "*Ngudiang anak luh mesekolah tegeh-tegeh, nyanan masih kal ke paon*", "*Anggon gene mesekolah joh-joh, men suba nganten sing meanggo ilmune*", "*Ngengken anak luh mesekolah tegeh-tegeh, nak len kal maan*", "*Kuliah deket-deket sini aja, ga usah jauh-jauh kuliah.*", (Sartini, 2021).

Wacana-wacana berikut masih sering dijumpai oleh perempuan Bali, khususnya pengalaman pribadi peneliti. Ketika mengharuskan untuk melanjutkan kuliah di perantauan, peneliti diberikan salah satu wacana sebagai "anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi". Kondisi ini tentu saja menjadi penghambat adanya kesetaraan peran yang ideal untuk seluruh lapisan masyarakat, (Sartini, 2021).

### **SIMPULAN**

Masyarakat Bali masih mencerminkan struktur patriarki pada aspek hak waris. Keluarga yang tidak menerapkan sistem patrilineal akan menjadi sorotan

masyarakat dan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi *kasepe kang*, yang melibatkan pengucilan dan penolakan berkomunikasi oleh anggota masyarakat dalam satu banjar, dapat diberlakukan terhadap keluarga yang melanggar norma tersebut. Pengaruh budaya patriarki juga mencakup aspek pendidikan, pekerjaan, dan hak berpendapat perempuan. Terdapat wacana-wacana yang menghambat perempuan Bali dengan bebas untuk menempuh pendidikan. Ketidaksetaraan berpartisipasi masih terjadi karena perempuan Bali dianggap sebagai individu yang emosional, peminta maaf, ragu-ragu, dan plin-plan, sementara laki-laki lebih sering mengungkapkan pernyataan yang tegas, sederhana, dan kuat. Stereotip menciptakan persepsi bahwa pandangan dan kontribusi perempuan diabaikan atau tidak dianggap penting.

Kemajuan zaman tidak memengaruhi masyarakat Bali dalam memegang teguh nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial. Masyarakat Bali menilai bahwa sistem patrilineal tidak relevan karena terus membatasi perempuan, kesadaran akan isu kesetaraan gender menjadi kunci

untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil dan sejahtera bagi perempuan. Kondisi ini perlu perhatian penuh dari pemerintah untuk berperan dalam memastikan hak yang setara bagi semua masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G. A., Ardiansyah, P., & Danarlie, R. A. (2022). Ketimpangan gender di Bali : Analisis budaya patriarki, peran adat dan agama, serta relevansinya di dunia moderen. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 18 (2), 81-93.
- Arta, I. K. K., Sudiarmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), hal. 34. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28658>
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Erna Wintari, M., & Agus Suparta, G. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2241>
- Firdaus, M. (2021). Fenomena Ruang Domestik dan Publik Perempuan Bali: Studi Fenomenologi Fenomenologi Feminisme di Bali. *Commercium*, 4(2), 161-171. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41895/36065>
- Fransiska, K., Oktarina, K., & Komalasari, Y. (2022). Triple Roles Perempuan Bali: Ancaman atau Proteksi (Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga). *Jurnal Sintesa*, 5(2001), 353-360.
- Hartati, W. D. (2014). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi*, 149-162.
- Hasan, N., & Maulana, R. (2014). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 149-162.
- Iqbal, A., Hassan, S., Mahmood, H., & Tanveer, M. (2022). Gender equality, education, economic

- growth and religious tensions nexus in developing countries: A spatial analysis approach. *Heliyon*, 8(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11394>
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>
- Nasution, W. S., Irawati, R. I., & Muhafidin, D. (2022). Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 368. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41326>
- Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 116–121. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.116-121>
- Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Seriadi, S. L. N. (2019). Perempuan Hindu. In *Sim.Ihdn.Ac.Id*. <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-122111072737-73.pdf>
- Suartini, N. K., & Yuniarika Parwati, N. P. (2020). Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan Di Bali. *Jurnal Pendidikan Sejalah Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 37–46. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/nirwasita/article/view/866>
- Suryanata, W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Widayani, N. M. D., & Hartati, S. (2015). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 149–162. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.149-162>
- Yani, N. L. S., & Indrayani, L. (2021). Keterlibatan Perempuan Dalam Sektor Pertanian Untuk Menunjang Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Feminisme (Studi Kasus Di Desa Songan, Bangli, Bali). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 261. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.33065>